

HASIL QUICK COUNT

Pilkada Toraja Utara Dua Putaran

Calon perorangan unggul.

PALOPO — Pemilihan kepala daerah Toraja Utara ada kemungkinan akan berlangsung dua putaran. Demikian hasil hitung cepat (*quick count*) yang dilakukan Script InterMedia kemarin.

Dalam hitung cepat itu, dari tujuh pasangan yang bertarung, tak ada satu pun yang meraih 30 persen suara. Hingga pukul 18.00, dengan jumlah tempat pemungutan suara yang masuk sebesar 76,34 persen (284 TPS), dua pasangan yang meraih suara terbanyak adalah Y.S. Dalipang-Simon Liling (26,79 persen) dan Frederik Batti Sorring-Frederik Buntang Rombe Layuk (26,67 persen).

Dalipang-Simon maju melalui jalur perorangan, sedangkan Frederik-Frederik diusung tujuh partai, di antaranya Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Patriot, Partai Nasional Indonesia-Marhaen, dan Hanura.

Daniel Rendeng-J. Palimbong di posisi ketiga dengan perolehan 16,52 persen suara, disusul Kala-tiku Paembonan-Alfritha Pasande Danduru (14,96), Bride S. Allorante-Johanis O.S. Bari (8,06), Deka Paranoan-Mathius Lobo (3,99), dan kandidat Partai Demokrat, A.P. Pongang-Sarah Lallo, dengan perolehan 3,02 persen suara.

Direktur Script InterMedia Yu-

hardin, mengatakan data tersebut tidak akan berubah. "Paling hanya bergeser sedikit. Yang pasti pilkada Torut ini dua putaran," katanya.

Menurut dia, *margin error* atau tingkat kesalahan hasil hitung cepat lembaganya nol persen. Dia mengatakan pihaknya menempatkan seluruh relawannya untuk melaporkan dari seluruh TPS.

"Jadi kami tidak menggunakan *sampling*. Kalau ada yang salah, itu hanya *human error*," katanya.

Unggulnya pasangan Y.S. Dalipang-Simon Liling juga mencatat sejarah baru di Sulawesi Selatan. Baru kali ini ada pasangan yang maju melalui jalur perseorangan unggul.

"Sebenarnya itu melenceng dari target kami," kata Dalipang, yang ditemui di rumahnya. Dia menginstruksikan tim pemenangannya mengawal kertas suara mulai panitia kecamatan hingga ke Komisi Pemilihan Umum.

Dihubungi terpisah, Harry Sorring, ketua tim pemenangan keluarga Frederik Batti Sorring-Frederik Buntang Rombe Layuk, tetap optimis jagoannya menang satu putaran.

Menurut Harry, sesuai dengan perhitungan saksi di seluruh TPS, berdasarkan formulir C1, pasangan yang diusung tujuh partai ini meraih suara di atas 30 persen. "Apalagi, di beberapa kecamatan basis kami, suara banyak yang belum masuk," katanya.



Dua petugas melakukan penghitungan suara pemilihan bupati Toraja Utara di TPS 5 Kelurahan Rinding Batu, Toraja Utara, kemarin.

Kendati demikian, jika pemilihan digelar dua putaran, pasangan Frederik siap. "Kita tidak ingin mendahului KPU. Kalau terpaksa dua putaran kami siap," katanya.

Katian Dago, tim Media pasang-

an Bride S. Allorante-Johanis O.S. Bari, belum mengakui kemenangan kandidat lainnya karena pihaknya masih melakukan penghitungan.

Ketua KPU Toraja Utara Johanis Banga Rombe mengatakan pihak-

nya tidak bertanggung jawab atas hasil hitung cepat. "Itu urusan calon. Yang pasti, hasil pilkada akan diketahui setelah kami melakukan penghitungan secara manual di KPU," ucap dia. ● MUHAMMAD ADNAN HUSAIN

Polisi dan Jaksa Wajo Akan Diadili

WAJO — Mediasi damai yang digelar antara mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone Fatmawati, dengan Kepolisian Resor Wajo, Kejaksaan Negeri Sengkang, dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara Bone, yang dituntut sebesar Rp 1,45 miliar, tidak mencapai kesepakatan. Karena itu, kepolisian dan kejaksaan akan segera dipengadilan.

Dalam mediasi di Pengadilan Ne-

geri Sengkang kemarin, kuasa hukum Fatmawati, Aminuddin Hasanuddin, menyatakan gugatan itu diajukan karena kliennya merasa dirugikan, setelah truknya disita sebagai barang bukti.

Juru bicara Pengadilan Negeri Sengkang, Zulkifli Sultan, mengatakan keputusan untuk melanjutkan ke persidangan terpaksa dilaksanakan karena pihak penggugat dan tergugat tidak mencapai kese-

pakatan. "Karena gagal mencapai kesepakatan, prosesnya akan dilanjutkan di pengadilan," ujarnya.

Kesepakatan tidak tercapai karena penggugat tetap meminta uang ganti rugi, sedangkan kepolisian dan kejaksaan mengaku tidak punya dana. "Mungkin minggu depan sidangnya," ujarnya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo Ajun Komisaris Ilyas Dohan membenarkan soal gagal-

nya mediasi. "Jadi kita tinggal menunggu sidang yang ditentukan pengadilan," ujarnya.

Truk Fatmawati disita dalam kasus dugaan *illegal logging* dengan terdakwa Syarif Goga pada 2008. Pengadilan kala itu memutuskan Syarif terbukti bersalah karena mengangkut, memiliki, dan menguasai hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah hasil hutan. Barang bukti berupa kayu dan mo-

bil truk itu dinyatakan dirampas oleh negara. Putusan pengadilan negeri itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

Namun putusan Mahkamah Agung pada Februari 2010 menyatakan bahwa Syarif tidak terbukti bersalah. Ia pun dibebaskan, dan barang bukti berupa kayu kemiri, setungg, dan mangga, beserta truknya dikembalikan. ● ANDI PAJUNG

Polisi Wajo Diminta Usut Tuntas Bantuan Banjir

WAJO — Kepolisian Resor Wajo diminta serius mengusut bantuan banjir di Kabupaten Wajo, termasuk dana Rp 1 miliar dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. "Sampai saat ini pendistribusian bantuan itu ke masyarakat masih minim, jadi kami mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini," Direktur Lembaga Advokasi dan Penguatan Masyarakat Sudirman di Wajo kemarin.

Menurut dia, yang perlu diungkap apakah bantuan menteri itu hanya sebatas di atas kertas atau Pemerintah Kabupaten Wajo yang belum mendistribusikan. Hal itu

karena masih ada korban banjir yang mengaku belum menerima bantuan itu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo Ajun Komisaris Ilyas Dohan mengaku hingga saat ini masih melakukan penelusuran. "Saat ini kami masih melakukan konfirmasi dan mengumpulkan data," ujarnya saat ditemui di Polres Wajo kemarin.

Siang kemarin, Kepala Bidang Kesetiakawanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wajo, Sahran, mendatangi penyidik tindak pidana korupsi, Polres Wajo, sekitar pukul 12.15.

Sahran kepada *Tempo* mengaku hadir untuk diperiksa serta menyerahkan beberapa dokumen mengenai asal dan penyaluran bantuan bencana tersebut. "Datanya sudah saya serahkan, kecuali untuk bantuan Menko Kesra karena masih menunggu konfirmasi dari Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah," ujar Sahran.

"Jadi yang belum masuk daftar itu hanya bantuan beras dari provinsi 100 ton, uang tunai Rp 200 juta, bambu 1.000 batang, dan beras 7,5 ton serta bantuan dari Menko Kesra," ujarnya. Dia menegaskan, sebagian bantuan ini sudah disalur-

kan.

Penyidik kepolisian, Salehuddin, yang menangani dugaan kasus korupsi tersebut, mengatakan Sahran dipanggil untuk mengklarifikasi penyaluran bantuan banjir dan menyerahkan laporan mengenai penerimaan bantuan dan penyalurannya.

"Tapi datanya masih kurang jadi Senin nanti kita akan kembali panggil untuk klarifikasi lagi," ujarnya.

Data yang kurang adalah bukti penyerahan kepada penerima. "Jadi sesuai dengan pernyataannya bahwa Dinas Sosial hanya mengelola

bantuan itu dan kemudian disalurkan oleh kepala desa dan lurah, namun berita acara itu belum ada," ujarnya.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Andi Safada mengaku belum pernah dipanggil polisi dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan itu. Ia mengaku memiliki bukti penyaluran bantuan itu. "Data dan kuitansi pembelian sembako itu ada pada anggota saya," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Andi Tenriliweng mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menyalurkan bantuan.

● ANDI PAJUNG